

ABSTRAK

PT. X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi. Dalam kegiatannya, beberapa lawan transaksi atau pengguna jasa PT. X adalah perusahaan BUMN. Sejak diterbitkannya PMK Nomor 85/PMK.03/2012 yang berlaku 1 Juli 2012 terdapat perbedaan mekanisme pemungutan hingga pelaporan PPN, karena BUMN ditetapkan sebagai pemungut PPN. Dengan adanya peraturan tersebut, pelaporan PPN PT. X menjadi lebih bayar dan menimbulkan resiko pemeriksaan pajak. PT. X belum siap dengan resiko tersebut, sehingga untuk tahun 2012 PT. X menerapkan perencanaan pajak khususnya PPN dengan memanfaatkan fasilitas pengkreditan masa pajak tidak sama sesuai dengan aturan di UU PPN No. 42 Tahun 2012 Pasal 9 ayat 9.

Penelitian ini dilakukan di PT. X yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Surabaya. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari bagian keuangan yang terkait dengan perpajakan. Untuk pengumpulan data, digunakan teknik penelitian lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode penilitin kualitatif deskriptif.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa setelah diterapkannya perencanaan pajak atas PPN, pelaporan PPN PT. X di tahun 2012 tidak lagi Lebih Bayar sehingga mengurangi resiko pemeriksaan pajak.

Kata kunci : PPN, Perencanaan PPN.

ABSTRACT

PT. X is a company that engaged in construction. It has lots of transactions with state-owned companies. Since the issuance of the applicable PMK 85/PMK.03/2012 July 1, 2012 there are differences in the mechanism of VAT collection to reporting. Given these rules , VAT reporting PT . X becomes more pay and raises the risk of tax audit. PT. X is not ready to risk that, so for 2012 PT. X implement tax planning to take advantage of the facilities, especially the VAT tax crediting period is not the same in accordance with the rules in the VAT Act No. 42 In 2012, Article 9, paragraph 9.

This research was conducted in PT . X, located at Dukuh Kupang Surabaya. Sources of data in this study were drawn from finance -related taxation. For data collection, field research techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis method used is descriptive qualitative method.

From the results, it can be concluded that after the implementation of the VAT tax planning, VAT reporting PT. X in the year 2012 is no longer, there by reducing the risk of overpayment of tax inspection.

Keywords : VAT , VAT Planning